

**ANALISIS STRATEGI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah
Demak)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

UMMI NURUL HIDAYAH

1605026115

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2018

Choirul Huda, M.Ag

Perum Bukit Beringin Asri D.20, Tambakaji, Ngaliyan.

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI

Blantrik Tirtomulyo Kretek Bantul.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ummi Nurul Hidayah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Ummi Nurul Hidayah
NIM : 1605026115
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Analisis Strategi Program
Pembangunan Desa dalam
Pengentasan Kemiskinan Perspektif
Ekonomi Islam.**

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Choirul Huda, M. Ag

NIP. 19760109 200501 1 002

Semarang, 10 Juli 2018

Pembimbing II



Singgih Muheramtohad, MEI

NIP. 19821031 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. (Hamka Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp 024-7608454 Fax 024-7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ummi Nurul Hidayah
Nim : 1605026115
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **“ANALISIS STRATEGI PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1.

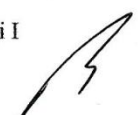
Semarang, 27 Juli 2018

Mengetahui


Ketua Sidang, ✓


H. Khoirul Ansyar, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

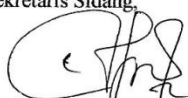
Penguji I


Dr. H. Inam Yahya, M. Ag
NIP. 19700410 199503 1 001


Pembimbing I


Choirul Huda, M. Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

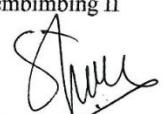
Sekretaris Sidang,


Choirul Huda, M. Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji II


Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II


Singgih Muheramtohadhi, MEI
NIP. 19821031 201503 1 002



MOTTO

بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertai di dunia maupun di akhirat. Amin.

Dalam wujud syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Abah (H. Muhyiddin) dan Ibu (Umrotun Chasanah) sebagai orang tua tercinta yang telah memperkenalkan aku pada kehidupan dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian, semoga Allah memberi yang terbaik.
2. Untuk kedua adikku Muhammad Noor Rifqi Hidayat dan Zeni Fitri Adibatus Salamah yang selalu memberi semangat.
3. Untuk Sigit Kurniawan, Ratih Kumalasari, Tri Isma Rokhaeni, Nisa Aulia, Maya Qori'aina, dan Sagita Ayu Budiati yang selalu membawa keceriaan dalam keseharianku serta memberi semangat, nasihat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman seperjuanganku Transfer D3 Perbankan Syariah ke S1 Ekonomi Islam angkatan 2016 yang telah berbagi ilmu serta bantuan dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis hanya dapat memberikan ucapan terimakasih dan do'a

semoga Allah SWT selalu senantiasa mencurahkan karunianya kepada kita semua. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juli 2018

Deklarator,



Ummi Nurul Hidayah
NIM. 1605026115

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	S	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	`
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Bacaan *Madd*:

Pendek	A = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang	Â = آَ	î = آِ	û = آِ
Diftong	Ay = اَيَّ	aw = اَوَّ	

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Namun, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi faktor yang menghalangi proses pembangunan desa. Untuk upaya menanggulangi kemiskinan diadakan beberapa program yaitu memberi keterampilan, kerajinan dalam membentuk perekonomian pedesaan. Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya rata-rata pekerjaan masyarakat adalah bertani, berternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang. Melihat kondisi tersebut pemerintah Desa Tambakbulusan melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak? 2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat setempat dan pemerintah desa Tambakbulusan. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumen yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Program Pembangunan Desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan

masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Kata kunci: pembangunan desa, pengentasan kemiskinan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ahmad Furqon, Lc. M.A selaku kepala jurusan S1 Ekonomi Islam dan jajarannya.
4. Bapak Choirul Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Singgih Muheramtahadi, S. Sos,I, MEI selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang atas kebijaksanaan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap jajaran pemerintahan Desa Tambakbulusan, masyarakat desa Tambakbulusan serta LSM Blue Forest, terima kasih telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga proses wawancara, foto

bersama dan dokumentasinya. Karena keramahan dan kebaikan semua pihak terutama memberikan informasi sehingga penelitian berjalan begitu dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya. Amin

Semarang, 27 Juli 2018

Penyusun,

UMMI NURUL HIDAYAH

NIM: 1605026115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TEORI STRATEGI PROGRAM PEMBANGUNAN	
DESA, PENGENTASAN KEMISKINAN	21
A. Pembangunan Desa	21
1. Pengertian Desa	21
2. Dasar-dasar Pembangunan Desa.....	32

3. Otonomi Desa	35
4. Perencanaan Pembangunan Desa	37
5. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah.....	42
B. Konsep Pembangunan dalam Islam	45
C. Pengentasan Kemiskinan	56
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TAMBAK	
BULUSAN.....	71
A. Sejarah Berdirinya Desa Tambakbulusan	71
B. Visi dan Misi Desa Tambakbulusan.....	74
C. Kondisi Geografi Desa Tambakbulusan	75
D. Kependudukan.....	76
E. Upaya Pemberdayaan yang sudah Berjalan	82
F. Struktur Perangkat Desa Tambakbulusan	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan	87
B. Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam	100
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	111
B. Saran/Rekomendasi.....	112
C. Penutup.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Perangkat Desa Tambakbulusan.....	86
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Demak Tahun 2011-2017	6
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Tambakbulusan pada Tahun 2018.....	77
Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin Desa Tambakbulusan	78
Tabel 4 Daftar Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Tambak bulusan	79
Tabel 5 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. BAPPENAS (1998) juga mengatakan “Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima aspek yaitu, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu, dengan kekuatan sendiri, menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan”.¹

¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.233

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga, hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebab dan akibat (teori Nurkse) telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah.

Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. Kedua, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan suatu masyarakat. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut.

Namun pada kehidupan nyata, masalah-masalah sosial terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan menjadi agenda pembahasan negara yang sampai sekarang belum selesai pemecahannya. Salah satu masalah sosial tersebut adalah tentang pengentasan kemiskinan khususnya di negara Indonesia ini, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang mencoba memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.²

² Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 5

Dalam pandangan Islam kemiskinan dianggap sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan, karena wawasan ekonomi Islam lebih banyak memandang potensi alam yang dianugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya (adequacy) dari pada segi kekurangan atau kelangkaannya (scarcity).

Oleh karena itu jika kelangkaan itu muncul, maka akibat kesalahan orang dalam memanfaatkannya, melestarikan atau karena kebodohan dan kemalasannya. Kemiskinan dipandang oleh Islam sebagai patologi sosial yang harus ditanggulangi.³

Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perdesaan hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai priotas mendesak, khususnya terhadap masyarakat perdesaan. PNPM-MD sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif.⁴

³ Muhammad Tholhah, Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005, h.58.

⁴ Angga Harahap, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan* (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis.⁵

Pemberdayaan dalam konteks pembangunan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus memperbaiki taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan.

Tujuan diadakan program tersebut adalah untuk memberi ketrampilan, dan kerajinan dalam membentuk perekonomian perdesaan. Di daerah tersebut masih sulit pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa. Di daerah Tambakbulusan perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya, rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, beternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang.

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), Medan: Tesis Universitas Sumatera Utara, 2010.

⁵ Muthoriq dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No 3, h. 426.

Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Akibat dari tertinggalnya perekonomian perdesaan maka pemerintah mengadakan pelatihan, dengan tujuan membentuk karakter setiap pemuda dalam membangun perekonomian desa. Di daerah tersebut masih kurang banyak fasilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Demak Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2011	18.21 %
2012	16.73 %
2013	15.72 %
2014	14.00 %
2015	14.44 %
2016	14.10 %
2017	13.41 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial penduduk di Kabupaten Demak merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Dari alasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan yang berjudul **”Analisis Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Tambakbulusan kecamatan Karangtengah Demak?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Tambakbulusan kecamatan Karangtengah Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan pada Desa Tambakbulusan Kecamatan Karang Tengah Demak.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan pada Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

a. Manfaat Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam. Secara teoritis manfaat penulis akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan

masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rosnawati pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Islam”. Dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis tentang program alokasi dana desa yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Way Kanan dalam perspektif Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosfa Nur Azizah pada tahun 2017 yang berjudul “Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam deskripsi tersebut penulis membahas mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program

pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat didalamnya, dan menganalisis alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Titis Istikomah pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)”. Dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis tentang program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 – 2010 ditinjau dari persepsi anggota KSM terhadap program serta perbedaan pendapatan usaha, tabungan, dan investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan analisis strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan.

Selain menggunakan penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian

⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006, h.112.

dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.⁷

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan.⁸

2. Sumber data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari para masyarakat setempat dan pemerintah Desa

⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002, h. 142-144

⁸ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1998, h.60.

Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi.⁹ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu Badan Pusat Statistik, Kantor Kelurahan Tambakbulusan.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

⁹ Benyamin Lakitan, et al. *Metodologi Penelitian*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998, h. 77

Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu.¹⁰

Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah para aparatur desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan masyarakat Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut.

Dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan juga transkrip. Adapun data yang diperoleh dari subjek penelitian ini adalah dengan meminta data langsung pada subjek untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, meliputi data tentang pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan dari aparatur desa yang terlibat.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.118

pencatatan. Pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya kamera, video tape, dan audio tape recorder.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

4. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan

mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi diharapkan masalah teknis atau konseptual tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran analisis.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.¹¹

Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan editing, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak.

c. *Analyzing*

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh

¹¹ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 135-154.

dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.¹²

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karangtengah Demak.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfa Beta, 1998, h. 300

F. Sistematika Penulisan

Untuk memeberikan kemudahan dalam memahami Tugas Akhir maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
- Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II** :Teori Strategi Program Pembangunan Desa, Pengentasan kemiskinan.
- Pembahasan umum tentang pengertian pembangunan desa, konsep pembangunan dalam Islam, pengentasan kemiskinan.
- BAB III** : Gambaran Umum Desa Tambakbulusan
- Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya desa Tambakbulusan, visi dan misi Desa, kondisi geografi desa, kependudukan, upaya pembangunan yang sudah berjalan, struktur perangkat desa.

BAB IV**: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini adalah hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan, dan perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan.

BAB V**: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, penutup.

BAB II

TEORI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA, PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota dan perkotaan. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.¹

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.²

Menurut R.Bintarto yang memandang desa dari aspek geografis mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil

¹ Nurman, *Strategi...*, h. 226

² Candra Kusuma Putra et al, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

perwujudan antara kegiatan sekelompok orang manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah satu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politisi, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”³

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bargel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek, yaitu:

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesamaarganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Sorokoin dan Zimerman mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata pencaharian,

³ Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lainnya yang nyata terlihat, produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di bawah kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” *menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.*⁵

⁴ Nurman, *Strategi ...*, h. 226-228.

⁵ Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, h.3.

Dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah desa tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, termasuk pengawasan pepresentatif terhadap peraturan desa.⁶

a. Karakteristik Pedesaan

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota dan desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Peranan kelompok primer sangat besar.
2. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
3. Hubungan lebih bersifat homogen.
4. Struktur masyarakat bersifat homogen.
5. Tingkat mobilitas sosial rendah.
6. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsi sebagai unit ekonomi.

⁶ Jayadinata, et al. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006, h. 262.

7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.⁷

Sorokoin dan Zimerman mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang nyata terlihat yaitu produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.⁸

Secara psikologis masyarakat desa cenderung suka curiga terhadap orang luar. Namun demikian, masyarakat desa dapat bersifat hemat, cermat, dan menghormati oranglain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

b. Tipologi Desa

Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok

⁷ Nurman, *Strategi...*, h. 228.

⁸ Nurman, *Strategi...*, h. 228.

dapat ditentukan tipe desa beserta karakteristik dasarnya.⁹

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1) Desa Swadaya (Tradisional)

Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

- a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah pertahun.
- c) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e) Prasarana masih sangat kurang.

⁹ Nurman, *Strategi ...*, h. 230.

- f) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.¹⁰

2) Desa Swakarya (Transisi)

Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai melupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b) Produksi desa masih pada tingkat sedang yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.

¹⁰ Nurman, Strategi ..., h. 231.

- d) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f) Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.¹¹

3) Desa Swasembada (Maju/Berkembang)

Desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Sarana dan prasarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan.

¹¹ Jayadinata, et al., *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006, h. 90.

- b) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong-royong dalam pembangunan desa.¹²

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

c. Pemerintahan Desa

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

¹² Jayadinata, *Pembangunan ...*, h. 91.

kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.¹³ Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

- a) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu ke Bupati.
- c) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk

¹³ Nurman, *Strategi ...*, h. 233

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

- d) Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- e) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g) Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.¹⁴

Pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan

¹⁴ Nurman, *Strategi ...*, h. 234

membatasi peran pemimpin desa atau perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.¹⁵

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi menayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.¹⁶

2. Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebut bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural*

¹⁵ Nurman, *Strategi ...*, h. 235

¹⁶ Nurman, *Strategi ...*, h. 237

development) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.¹⁷

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a) Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas da daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.¹⁸

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusiamerupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-

¹⁷ Nurman, *Strategi ...*, h. 240

¹⁸ Nurman, *Strategi ...*, h. 242.

usaha pembangunan, pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.¹⁹

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan

¹⁹ Rosfa Nur Azizah, Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2017, h. 30

kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.²⁰

3. Otonomi Desa

Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek bahasa, tingkat pendidikan dan lainnya.

Otonomi desa dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999 sebagai daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten dan kecamatan. Penyelenggara pemerintah desa dijelaskan merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah

²⁰ Nurman, *Strategi*, h. 243.

bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.²¹

Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri. Ciri paling kuat pemerintah desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong-royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal keuangan. Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan merupakan landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Mengkerucutnya kebijakan otonomidaerah menuju desa seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli desa. hal ini merupakan kewajiban untuk meyakinkan pemerintah agar memberi otonomi murni agar desa dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai bukti keberhasilan praktik pengelolaan sumber daya hutan memberi bukti otonomi desa dapat di proses melalui

²¹ Nurman, *Strategi ...*, h. 260.

kehandalan sosial dan peningkatan ekonomi rumah tangga.²²

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.²³ Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat rt/rw, dusun, dan desa.

²² Nurman, *Strategi ...*, h.260.

²³ Nurman, *Strategi ...*, h. 262.

- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.²⁴

Kebijaksanaan pembangunan wilayah perdesaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakanaksanaan yang secara tidak langsung mengarah kepada tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.²⁵ Dalam hal ini termasuk pula penciptaan kondisi yang menjamin keberlangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara sistematis, dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Kebijakanaksanaan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Dalam hal ini pengembangan ekonomi rakyat paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah lembaga ekonomi (misalnya melalui kelompok tani). Harus dilakukan terhadap:

²⁴ Nurman, *Strategi ...*, h. 263.

²⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 19.

- a. Akses terhadap sumberdaya
 - b. Akses terhadap teknologi (menggunakan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien)
 - c. Akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi.
 - d. Akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi.
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijakan ini misalnya: jaminan pengaman sosial (JPS) yang memberikan bantuan uang kepada orang miskin, peraturan yang melindungi terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi pelayanan kepada penduduk miskin.²⁶

Perencanaan pembangunan perdesaan disuatu daerah (kabupaten) dilakukan untuk mengatasi masalah yang berdasarkan urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas sumberdaya manusia pertanian yang belum optimal
- 2) Pembinaan petani oleh instansi teknis yang belum optimal
- 3) Produktivitas lahan rendah
- 4) Kesuburan tanah semakin berkurang

²⁶ Ibid, h.20.

5) Kerusakan lingkungan.²⁷

Strategi dan arah pembangunan desa di Indonesia. Dapat diterangkan bahwa strategi pembangunan masyarakat desa adalah:

- a. Sesuai dengan strategi pembangunan nasional.
- b. Dilakukan secara bertahap.
- c. Tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri.
- d. Dalam pelaksanaannya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis harus dapat terbina dan terpelihara.
- e. Mampu mengubah struktur perekonomian desa
- f. Dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat.
- g. Dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk.
- h. Dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut beberapa prinsip yang telah ditetapkan.
- i. Masyarakat desa harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- j. Dapat memanfaatkan potensi desa secara rasional dan optimal tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam.

²⁷ Adisasmita, *Pembangunan . . .*, h.43

k. Dilakukan melalui tahapan desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada dengan pelaksanaan secara komprehensif (menyeluruh) dan koordinatif.²⁸

Untuk itu perencanaan pembangunan agar diarahkan untuk mengembangkan potensi dasar (*basic potential*) unggulan melalui pengembangan potensi turunan (*derived potentials*) yang relevan. Perdesaan mempunyai banyak potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pengembangan potensi turunan utamanya adalah:

1. Pengembangan komoditas pertanian unggulan terpadu
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Pelestarian lingkungan dan konservasi alam
5. Pengembangan agrowisata dan wisata agro
6. Pengembangan industri kecil dan kerajinan.²⁹

Dari hasil analisis keadaan desa diperoleh petunjuk tentang:

- 1) Masalah yang dihadapi.
- 2) Potensi yang dapat digali dan dikembangkan.
- 3) Perkembangan desa yang bersangkutan.³⁰

²⁸ Jayadinata, et al. *Pembangunan ...*, h.89

²⁹ Adisasmita, *Pembangunan . . .*, h. 44

³⁰ Jayadinata, et al. *Pembangunan ...*, h. 92

5. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat pembangunan di desa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda), dan

rencana jangka panjang (10-25 tahun) dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).³¹

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berada dalam koordinasinya, sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apapun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, aspiratif serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJMDes yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah atau kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT/RW/dusun dan desa.³² rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut:

- a. Di tingkat masyarakat dilakukakn identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT/RW/dusun.
- b. Di tingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang

³¹ Nurman, *Strategi ...*, h. 267.

³² Azizah, *Strategi ...*, h. 40.

- akan di biayai APBDesa atau APBD melalui forum Musbangdes.
- c. Di tingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.
 - d. Di prioritas usulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut diantaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.³³

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan antarkabupaten.

³³ Nurman, *Strategi ...*, h. 269.

B. Konsep Pembangunan dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.³⁴

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (*manhāj*) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi.³⁵

Menurut Umer Chapra yang dikutip oleh Mustava Edwin, ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis, tanpa mengekang kebebasan individu secara

³⁴ Titis Istikomah, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building (ECB) dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015, h. 45

³⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009, h.42.

berlebihan dan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.³⁶

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia.

Dalam firman Allah QS. al-Anfal ayat 53:

“بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا ...
بِأَنفُسِهِمْ”

“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

Sama halnya seperti penjelasan QS. al-Anfal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 91.

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.

Pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.³⁷

Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

³⁷ Nur Sahida Mohammad, et al. *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan*, Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013, h.362.

- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dalam QS. Al Maidah ayat 2:

“... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ... وَالْعُدْوَانِ”

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (megerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Ayat ini menjelaskan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu sendiri.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

- a. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan dari Allah.

- b. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
- c. Mesti menanam nilai-nilai agama dan akhlak.
- d. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- e. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa.³⁸

Kegiatan dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelembagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, sebagai berikut:

- a. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
- b. Penggalangan ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
- c. Manjalin dan mewujudkan berbagai MOU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
- d. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
- e. Katalisasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- f. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.

³⁸ Mohammad, *Pembangunan...*, h. 363

- g. Mendampingi penyusunan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
- h. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat.
- i. Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.³⁹

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam,⁴⁰ antarlain:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (*falah*) diakhirat. Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya

³⁹ Azizah, *Strategi . . .*, h. 55.

⁴⁰ Sa'adatina Khuzaimah, "*Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian dan pemberdayaan.

2. Prinsip Nubuwah

Prinsip nubuwah merupakan prinsip ekonomi kenabian, maksudnya adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Prinsip nubuwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia dan merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang di amanahkan untuk memberi teladan dan membimbing umat Islam sesuai dengan ajaran Allah.

Prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Sifat shiddiq berarti jujur dan benar. Rasulullah adalah seorang pedagang yang menanamkan prinsip kejujuran dalam setiap transaksi bisnis maupun kerjasama dengan pihak lain, oleh karena itu beliau mendapatkan gelar al-Amin. Sebagai pelaku ekonomi prinsip kejujuran ini haruslah dijadikan landasan agar tercipta transaksi bisnis yang fair dan sehat.

Sifat amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah adalah orang yang professional dan memiliki kredibilitas serta tanggung jawab, karena sifat amanah menduduki posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi haruslah memiliki sifat ini sebagai karakter ekonomi Islam.

Sifat tabligh berarti komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi Islam harus memiliki kemampuan dalam berkemonikasi dan juga harus transparan dalam mengelola kegiatan ekonomi, agar tidak ada pihak yang akan merasa di rugikan.

Sifat Fathonah berarti cerdas. Rasulullah adalah seorang yang cerdas dan memiliki intelektual tinggi, sehingga mampu menyeimbangkan antara urusan agama, ekonomi dan juga kenegaraan. Kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Seorang pelaku ekonomi harus memiliki kecerdasan dan wawasan agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien.

3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- 1) Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik

untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.⁴¹

- 2) Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup di dunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. Wujud keseimbangan juga terdapat dalam keseimbangan hak individu dan kolektif. Hak individu adalah hak yang boleh dimiliki secara sendiri, sedangkan hak kolektif adalah hak yang harus dimiliki atau diambil manfaatnya oleh banyak orang.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Keseimbangan dalam transaksi ekonomi terletak pada hak yang akan diberikan atau diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut, seimbang antara

⁴¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009, h. 91.

pemberian hak (upah) dengan yang telah dilakukan (kerjakan).⁴²

5. Prinsip Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya.

Prinsip keadilan menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.

Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan tiga hal, yaitu: keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan hukum.

a. Keadilan tukar-menukar

Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang

⁴² Nawawi, *Ekonomi ...*, h. 95

menjadi hak pihak lain atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain.

b. Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan suatu kebijakan yang terdapat di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan serta pembagian barang maupun jasa secara merata.

c. Keadilan sosial dan hukum

Keadilan sosial merupakan perilaku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Keadilan hukum merupakan perilaku manusia dalam mengatur hubungan yang seimbang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

6. Prinsip Masalah dan Manfaat

Prinsip masalah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (mafsadah) bagi manusia.⁴³

⁴³ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, h. 12.

Kemaslahatan merupakan hal penting dalam kehidupan, dimana kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama harus saling mendukung. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan bersama diperlukan sebuah instansi atau lembaga, dimana lembaga ini mempunyai wewenang dalam mengatur kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama.

7. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujudnya kegiatan yang bermanfaat untuk semua pihak.

C. Pengentasan Kemiskinan

Miskin dalam konteks fiqh dibedakan dengan faqir. Keduanya mewakili kelompok *dhu'afa'* (lemah/papa). Faqir adalah kelompok yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian. Walaupun ia punya keduanya tidak mencukupi kebutuhannya.

Misalnya ia punya 2 dinar kebutuhannya 10 dinar. Miskin adalah kelompok yang memiliki harta dan mata pencaharian, namun belum mencukupi sepenuhnya kebutuhannya. Misalnya ia punya 7 dinar kebutuhannya 10 dinar.⁴⁴

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan. Para sosiolog mengkajinya dengan menggunakan istilah kelas, stratifikasi, dan marjinalitas. Sedangkan, para pemerhati masalah-masalah social lebih memperhatikan konsep tingkat hidup yakni melihat tingkat pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial masyarakat secara umum.⁴⁵

Menurut Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang

⁴⁴ Nur Fatoni, "Peran Misyakat (Micro Finance Syari'ah untuk Masyarakat) DPU (Dompet Peduli Umat) Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Economica UIN Walisongo* Vol. V Edisi 1 Mei 2014, h. 77.

⁴⁵ Dede Rodin, "*Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an*", *Jurnal Economica UIN Walisongo* Vol. VI Edisi 1 Mei 2015, h. 71.

terbatas. Para ekonom berpandangan bahwa kemiskinan didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup.⁴⁶

Kemiskinan sebagai bagian dari sunnatullah, akan tetap ada sepanjang sejarah kemanusiaan. Allah SWT menciptakan alam ini dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Dia menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, dan tentunya kaya dan miskin dan seterusnya, karena pada hakekatnya manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera bukan berarti manusia harus kaya, akan tetapi mampu mengarungi hidup dengan saling membutuhkan dan membuang jauh-jauh kesusahan dan kemelaratan, karena inilah kehidupan yang sebenarnya. Usaha ini tidak akan siasia karena Allah SWT berfirman:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS. Asy-Syuura:12)

⁴⁶ Nur Khoirin, et al. *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang*, Semarang: Laporan Karya Pengabdian Dosen UIN Walisongo Semarang, 2014, h. 20.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah melapangkan rizki-Nya bagi orang yang dikehendaki-Nya. Arti dari yang dikehendaki ini sangat luas sekali, salah satu arti dari orang yang dikehendaki adalah orang yang mau berusaha. Artinya dia selalu berusaha mencapai kehidupan yang sejahtera.

Sejalan dengan firman Allah SWT:

“... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...”

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d:11)

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, berimplikasi jamak pada kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Sebagai suatu bangsa yang penduduknya kurang lebih 90% beragama Islam, tuntunan atau kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk didakwahkan. Karena potret kemiskinan umat seperti itu cenderung diartikan orang merupakan konsekuensi dari kepegunungan agama Islam.⁴⁷

Terdapat pula petunjuk salah satu isyarat yang sangat membantu untuk mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 5

kemiskinan, yakni satu bentuk permohonan yang berbunyi antara lain: “Aku mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepelitan, ketindihan hutang dan dikuasai sesama manusia.”⁴⁸

Secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.
- b. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.⁴⁹

Dari dulu hingga sekarang, manusia memiliki sikap yang

berbeda-beda terhadap kemiskinan, diantaranya adalah:

1. Sikap Golongan Pemuja Kemiskinan

Termasuk di dalam kelompok ini adalah orang-orang zahid, pendukung pertapaan, dan kaum sufi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari,

⁴⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h.173.

⁴⁹ Nur Khoirin, et al. *Pemberdayaan . . .*, h. 23-24.

kemiskinan dianggap sebagai bagian dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba pilihanNya agar hati sang hamba tetap terkait dengan akhirat, berpaling dari dunia, selalu berhubungan dengan Allah, dan pengasih kepada sesama. Dengan demikian, mereka tidak seperti orang kaya yang angkuh dan congkak.⁵⁰

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa alam ini semuanya rusak, dunia ini jelek dan hanya merupakan bencana (bala'). Kebaikan tertinggi ada pada kerusakan dan kehancuran alam ini sesegera mungkin, atau setidaknya, mempercepat durasi domisili manusia di alam raya ini. Dengan demikian orang yang berpikir normal harus tidak memperdulikan sebab-sebab yang bisa memperoleh kehidupan layak dan tidak perlu berinteraksi dengan manusia lain kecuali hanya untuk sekedar hidup.

Dalam agama penyembah berhala dan agama-agama samawi, ada orang yang mengakui pandangan di atas serta mendewakan dan menyucikan kemiskinan. Sebab, menurutnya, kemiskinan merupakan sarana yang baik untuk menyiksa jasad, dan menyiksa jasad merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kualitas ruh. Pandangan seperti ini juga banyak beredar

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, h.1

dikalangan sufi muslim sebagai pengaruh dari kebudayaan Islam dan berhasil mengkerukan kejernihannya, seperti Mistisisme India, Manikeisme Persia dan Monastisime Nasrani serta aliran-aliran lain yang masuk dan bersentuhan secara langsung dengan kehidupan muslim.⁵¹

2. Sikap Kaum Fatalis

Berbeda dengan kelompok yang pertama, kelompok ini memandang kemiskinan sebagai kejahatan dan malapetaka. Kemiskinan yang diderita orang miskin dan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya merupakan kehendak dan takdir Tuhan. Jika Allah berkehendak, dia bisa menjadikan semua manusia menjadi orang kaya, serta memberikan kekayaan seperti yang dimiliki Qarun. Tetapi Allah sengaja ingin mengangkat sebagian orang di atas orang lain dan memberi serta membatasi rizki untuk orang yang dikehendaki, untuk menguji mereka. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan-Nya. kemiskinan merupakan ketentuan samawi yang tidak mungkin dipecahkan dan diatasi. Solusi penghapusan kemiskinan yang diberikan oleh kelompok ini hanya sebatas pemberian nasihat.⁵²

⁵¹ Qardhawi, *Kiat ...*, 1995, h.17.

⁵² Qardhawi, *Teologi ...*, 2002, h. 3

3. Sikap Pendukung Kemurahan Individu

Kelompok ini berpendapat sama seperti kelompok kedua bahwa kemiskinan merupakan kejahatan dan malapetaka serta termasuk persoalan yang harus dipecahkan. Akan tetapi penyelesaian yang mereka usulkan tidak terbatas pada pemberian nasihat kepada kaum miskin agar mereka rela menerima nasibnya, tetapi lebih maju satu langkah yaitu, mereka juga mengingatkan orang-orang kaya agar berbuat baik dengan bersedekah kepada kaum fakir. Kelompok ini menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah jika menerima seruan moral tersebut. Sebaliknya, mereka mengancam orang-orang kaya dengan azab neraka bila bersikap kasar dan berlaku kejam terhadap kaum miskin.⁵³

4. Sikap kapitalisme

Kelompok ini melihat kemiskinan sebagai salah satu musibah dan problema kehidupan, namun yang bertanggung jawab untuk mengatasinya adalah orang miskin itu sendiri. Dalam hal ini, masalah kemiskinan dianggap sebagai suratan nasib. Masyarakat atau pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mengatasinya. Setiap orang bebas melakukan apa saja

⁵³ Qardhawi, *Teologi ...*, 2002, h. 4

dengan hartanya. Kelompok ini adalah kelompok Qarun, salah seorang dari kaum Nabi Musa yang kaya raya tetapi sombong. Mereka menganggap bahwa harta yang berhasil mereka kumpulkan adalah semata-mata atas kecerdasan dan kecerdikan mereka.⁵⁴

5. Sikap Sosialisme

Kelompok ini berkeyakinan bahwa upaya menghapuskan kemiskinan tidak akan berhasil tanpa menghilangkan 'aghniya' (orang-orang kaya) dan menyita harta mereka, dan membatasi kepemilikan harta, dari manapun sumber penghasilannya. Untuk mencapai ini diperlukan suatu pendekatan terhadap kelas-kelas lain dan berusaha membangkitkan rasa iri dan dengki serta membangkitkan api permusuhan diantara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Sehingga pada akhirnya, kelompok mayoritaslah yang menjadi pemenang, yaitu kaum buruh yang mereka sebut sebagai kaum proletar.⁵⁵

Oleh karena itu, ada beberapa sarana untuk mengatasi kemiskinan yaitu:

1) Sarana yang pertama yaitu bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan

⁵⁴ Qardhawi, *Teologi ...*, 2002, h.8

⁵⁵ Qardhawi, *Kiat ...*, 1995, h.21

memanfaatkan rezeki pemberian Allah. Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.⁵⁶

Bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan dan juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.

- 2) Sarana yang kedua yaitu jaminan sanak famili yang berkelapangan.

Islam memiliki prinsip orisinal di dalam syariatnya, ia menuntut setiap individu memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya yaitu bekerja dan berusaha. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang

⁵⁶ Qardhawi, *Kiat ...*, 1995, h.50-51.

kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu.⁵⁷

Dengan prinsip ini, hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental.

3) Sarana yang ketiga yaitu zakat.

Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapuskan kemiskinan.⁵⁸ Zakat memiliki fungsi sosial yaitu sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial.

4) Sarana yang ke empat adalah derma sukarela.

Islam selalu berusaha mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta

⁵⁷ Qardhawi, *Teologi ...*, 2002, h. 73

⁵⁸ Qardhawi, *Kiat ...*, 1995, h. 87

bukan tujuan, melainkan sebatas sarana. Sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.⁵⁹

- 5) Sarana yang kelima adalah jaminan baitul mal dengan segala sumbernya.

Dalam sistem Islam, sumber dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di baitul mal yang berasal dari berbagai sumber juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di baitul mal dapat dipergunakan. Harta baitul mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum.⁶⁰

Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan

⁵⁹ Qardhawi, *Teologi ...*, 2002, h. 266.

⁶⁰ Qardhawi, *Kiat ...*, 1995, h. 138.

sosial yang akut ini, Al-Qur`an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut:⁶¹

- 1) prinsip *ta`āwūn*, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya. Namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak-pihak terkait. Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku. Karena itu kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin mutlak diperlukan. Bentuk *ta`āwūn* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.
- 2) prinsip *syūrā*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan

⁶¹ Rodin, *Pemberdayaan ...*, h. 73.

persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Prinsip *syūrā* ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan kemiskinan tanpa *social capital* di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang pada prinsip *syūrā*. Sebab prinsip *syūrā* ini berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syūrā* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.⁶²

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antarlain merumuskan standargaris kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Diluar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui

⁶² Rodin, *Pemberdayaan ...*, h. 74.

pemberian dana bantuan, membangun infrastruktur di pedesaan, mengembangkan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan oleh pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukn hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk di Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan.⁶³

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya.⁶⁴

⁶³ Nur Khoirin, et al. *Pemberdayaan . . .*, h.42

⁶⁴ Nur Khoirin, et al. *Pemberdayaan . . .*, h.43

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TAMBAKBULUSAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Tambakbulusan

Setelah runtuhnya kerajaan di Demak pada tahun 1571 M, ditambah kedatangan para penjajah Portugis di tanah Jawa pada tahun 1598 M, banyak para prajurit dan para pendekar kerajaan demak yang kabur dan lari pergi mencari kehidupan baru, banyak dari mereka pergi di daerah pesisir. Apalagi krisis yang dialami Demak setelah para tokoh perwira penting Demak gugur menyerang blambangan dan para bangsawan atau pelaku ekonom Demak saat itu pergi ke Jepara, Kudus, Tambakbulusan, Morodemak, Bonang, Wedung, Bungo adalah tempat paling banyak ditempati mantan prajurit santri Demak yang menjadi nelayan dan menjadi rakyat biasa.¹

Desa Tambakbulusan dari segi bahasa terdiri dari kata Tambak dan Balusan. Tambak artinya empang dan Balusan adalah sejenis rumput ilalang yang tumbuh dibelantara tambak dan pantai yang dekat dengan laut Jawa, konon ceritanya para sesepuh pada zaman dahulu ada seorang petualang yang terdampar di pantai dan pantai tersebut berbau harum atau wangi jadi dinamakan muara Glagah Wangi, dari

¹<https://sochehsatriabangsa.wordpress.com/2017/04/17/sejarah-desa-tambak-bulusan-karantengah-demak-59561/amp/>, diakses 06 April 2018

cerita babat tanah Jawa Tambakbulusan adalah bagian dari kerajaan Demak yang waktu itu dikenal dengan alas glagah wangi.

Pada zaman dahulu desa Tambakbulusan ikut dalam satu wilayah dengan Desa Surodadi kecamatan Sayung. Adapun dukuh Tambakgembolo, dukuh Tambaktengah dan dukuh Tambakkontrak adalah satu wilayah Desa Tambakgembolo yang kecamatannya ikut Karangtengah. Karena letak dukuh Tambakbulusan dengan desa Tambakgembolo yang hanya berbatasan kali tangking. Maka tokoh-tokoh masyarakat dukuh Tambakbulusan dan Desa Tambakgembolo meminta kepada petinggi (lurah) Desa Surodadi agar dukuh Tambakbulusan dilepas dari wilayahnya, dan akan bergabung dengan Desa Tambakgembolo, dengan perundingan secara kekeluargaan dan ketentuan-ketentuan yang harus diterima Desa Tambakgembolo seperti: hasil pajak bumi dan bangunan masih dikuasai oleh Desa Surodadi.

Sejak saat itulah Desa Tambakgembolo ganti nama Desa Tambakbulusan kemudian pada tahun 1970-an antara Camat Sayung dengan Camat Karangtengah berunding di Kawedanan Grogol membahas tapel batas Desa Surodadi dan Desa Tambakbulusan.

Sejak itulah disepakati bahwa batas Desa Surodadi dengan Desa Tambakbulusan adalah sungai sinder bandang

dan juga menyerahkan sepenuhnya hasil bumi dan bangunan atau pajak kepada desa Tambakbulusan.²

Desa Tambakbulusan terdiri dari empat dukuh (kampung), ada 13 RT dan 4 RW yaitu:

1. Duku Tambakbulusan.
2. Duku Tambakgembolo.

Duku Tambakgembolo dari segi bahasa terdiri dari kata Tambak dan gembolo atau gembelo. Tambak artinya empang dan gembolo atau gembelo artinya berkumpul. Karena dulunya pada dukuh tersebut rumah-rumah warganya berpencar-pencar maka dari itu sesepuh di dukuh Tambakgembolo menyuruh warga untuk berkumpul (gembelo) dan disuruh untuk membangun rumah mereka agar saling berdekatan agar rasa kekeluargaan didapatkan.

3. Duku Tambaktengah

Duku Tambaktengah dari segi bahasa terdiri dari kata Tambak dan Tengah. Karena dukuh tersebut berada di tengah-tengah tambak diantara dukuh Tambakgembolo dan dukuh Tambakkontrak, sehingga dukuh tersebut dinamakan dukuh Tambaktengah.

4. Duku Tambakkontrak

² Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tambakbulusan Kec. Karangtengah Demak Tahun 2017-2022.

Pada zaman belanda tahun 1940-an kabupaten Demak jika musim hujan sering dilanda banjir, sehingga pemerintah berinisiatif membuat sungai baru yang melewati Desa Kalikondang sampai dengan aliran laut, pembuatan sungai tersebut dikontrakan kepada pemborong yang sudah siap membuat sungai tersebut dan sungai tersebut dinamakan sungai Tuntang baru atau biasa orang menyebutnya kali kontrak (sungai kontrak).

Dukuh Tambakkontrak berada ditepi sungai Tuntang baru (kali kontrak) di sekitar dukuh tersebut juga dikelilingi tambak sehingga dinamakan dukuh Tambakkontrak.³

B. Visi dan Misi Desa Tambakbulusan

Visi : “Sareng-sareng noto deso” artinya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta terwujudnya desa bermartabat, maju, sejahtera, dan berakhlakul karimah.

Misi :

1. Menelaah serta melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Tambakbulusan periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDES.
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Tambakbulusan yang transparan dan akuntable

³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhyiddin pada tanggal 7 April 2018.

3. Pelayanan kepada masyarakat yang mudah serta prima yaitu: cepat, tanggap, tepat dan benar
4. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi: sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan ekonomi rakyat.
5. Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintah desa Tambakbulusan
6. Meningkatkan pengelolaan aset desa untuk pembangunan desa
7. Pelaksanaan pembangunan yang berkeselimbangan dan mengedepankan partisipasi serta gotong royong masyarakat
8. Menciptakan kondisi masyarakat desa Tambakbulusan yang aman, tertib, guyub, rukun, dan berkarya dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu:
 - a. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi
 - b. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul
 - c. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum.⁴

C. Kondisi Geografi Desa Tambakbulusan

1. Desa Tambakbulusan merupakan sebuah desa dengan luas wilayah 235,862 Ha, dengan batas wilayah:
 - a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Morodemak Kecamatan Bonang.

⁴ Data Rencana Pembangunan...

- b) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Surodadi Kecamatan Sayung.
 - c) Sebelah Barat, berbatasan dengan Laut Jawa.
 - d) Sebelah Timur , berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Sayung dan Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah.
2. Luas wilayah 235,862 Ha dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pemukiman : 5,868 Ha
 - 2) Pertanian Sawah : 16,00 Ha
 - 3) Ladang/tegalan : 0,705 Ha
 - 4) Hutan Mangrove : 200 Ha
 - 5) Kantor Desa : 0,144 Ha
 - 6) Sekolah : 2,165 Ha
 - 7) Kuburan/Makam : 0,875 Ha
 - 8) Lapangan Sepak Bola : 10.069 Ha
3. Orbitasi
- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 10 KM
 - 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 Menit
 - 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 20 KM
 - 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 1 Jam.⁵

D. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Tambakbulusan pada tahun 2018 terdiri dari 2.524 jiwa yang terdiri dari 1277 orang laki-

⁵ Data Rencana Pembangunan...

laki, 1247 orang perempuan, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 798 KK.

Dari keterangan diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di desa Tambakbulusan berjumlah 2.524 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Serta semua warga Desa Tambakbulusan menganut agama Islam.⁶

Tabel 2
Jumlah Penduduk pada Tahun 2018

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	1.277
2.	Perempuan	1.247

Sumber: Kantor Desa Tambakbulusan tahun 2018.

b. Data Tingkat Kemiskinan Desa Tambakbulusan

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis suatu masyarakat dianggap sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan. Pada tahun 2016 akhir sampai 2017 awal jumlah penduduk miskin 782 KK sedangkan pada tahun

⁶ Data Rencana Pembangunan...

2017 akhir sampai 2018 awal mengalami penurunan sejumlah 364 KK. Berikut tabel data kemiskinan Desa Tambakbulusan:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Miskin Desa Tambakbulusan

Tahun	Jumlah
2016-2017	782 KK
2017-2018	364 KK

Sumber: Kantor Desa Tambakbulusan Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara terjadinya perubahan data jumlah penduduk miskin desa Tambakbulusan pada tahun 2016-2018 di karenakan jumlah penerima RASKIN (Beras Bersubsidi) menurun, pada tahun 2016-2017 sejumlah 782 KK sedangkan pada tahun 2017-2018 sejumlah 364 KK.⁷

c. Kondisi Ekonomi Desa Tambakbulusan

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, dimana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya selalu berbeda yang bedanya

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subkhan selaku Kaur Pembangunan pada 8 Mei 2018.

menyesuaikan dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

Mata pencaharian sebagian besar warga Desa Tambakbulusan adalah petani dan buruh. Mereka mengelola lahan pertanian yang masih mendominasi are wilayah mereka, selain itu juga memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan seperti bandeng dan udang. Kehidupan warga Desa Tambakbulusan sebagian besar didominasi dengan pola kehidupan masyarakat pesisir dengan tambak (perikanan) dan padi (pertanian) sebagai potensi besar Desa Tambakbulusan. Berikut tabel jenis pekerjaan penduduk Desa Tambakbulusan:

Tabel 4

Daftar Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Tambakbulusan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	157 Orang
2.	Pedagang	19 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Orang
4.	Tukang	3 Orang
5.	Guru	27 Orang
6.	Bidan/ Perawat	-
7.	TNI/Polri	1 Orang
8.	Pensiunan	1 Orang
9.	Sopir/ Angkutan	3 Orang

10.	Buruh	166 Orang
11.	Jasa Persewaan	-
12.	Swasta	75 Orang

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tambakbulusan Kec. Karangtengah Demak Tahun 2017-2022.

Menurut penulis dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 1.277 dan penduduk perempuan sejumlah 1.247, kurang sinkron pada data jumlah penduduk yang bekerja sejumlah 455 orang. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan data yang ada di desa Tambakbulusan kecamatan Karangtengah Demak.

d. Kondisi Pendidikan Desa Tambakbulusan

Meskipun kekayaan alam Desa Tambakbulusan sangat beragam dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, namun penduduknya masih tergolong kurang dalam perekonomian. Banyak anak-anak dan remaja yang hanya bisa sekolah sampai SMP saja dikarenakan himpitan biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar sehingga banyak yang memilih untuk bekerja di pabrik menjadi buruh atau merantau ke luar kota dan tidak melanjutkan ke SMA.

Berikut rincian mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Tambakbulusan:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	SD/MI	738 Orang
2.	SMP/MTs	405 Orang
3.	SMA/MA	372 Orang
4.	S1/Diploma	42 Orang
5.	Putus Sekolah	257 Orang

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tambakbulusan Kec. Karangtengah Demak Tahun 2017-2022.

Sebagian besar penduduk Desa Tambakbulusan tamat SD dengan jumlah 738 orang, diikuti penduduk yang tamat SMP sekitar 405 orang. Sedangkan lulusan sarjana (S1) hanya 42 orang, serta banyak yang putus sekolah, ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Tambakbulusan terhadap pendidikan. Fasilitas pendidikan yang berada pada Desa Tambakbulusan diantaranya:

- 1) 3 TK/PAUD
- 2) 2 SD Negeri
- 3) 1 SMP Swasta
- 4) 1 SMK Swasta

5) 2 Madrasah Diniyah (MADIN)⁸**E. Upaya Pembangunan yang Sudah Berjalan**

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam

meningkatkan pembangunan, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa.

⁸ Data Monografi ...

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sektor Jalan dan Jembatan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2017, Pemerintah Desa Tambakbulusan telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan di dusun-dusun.

Dalam wawancara dengan Bapak Subkhan, dikatakan bahwa:⁹

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Tambakbulusan di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Desa Tambakbulusan.”

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tambakbulusan, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan benar-benar dapat terasa manfaatnya.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Subkhan selaku Kaur Pembangunan pada 8 Mei 2018.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Tambakbulsan menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Tambakbulsan sendiri berharap masyarakat Tambakbulsan terutama para ibu hamil dan balita,

mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Desa Tambakbulusan mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu membuat batik, kuliner seperti bandeng cabut duri dll. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah desa Tambakbulusan mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.¹⁰

4. Menciptakan Program Kelompok Petani Tambak

Pemerintah Tambakbulusan juga menciptakan beberapa kelompok petani tambak yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari panen tersebut, salah satu programnya adalah memberi pelatihan dari dinas perikanan dan kelautan yaitu cara membuat makanan udang windu dan bandeng, cara memelihara udang windu

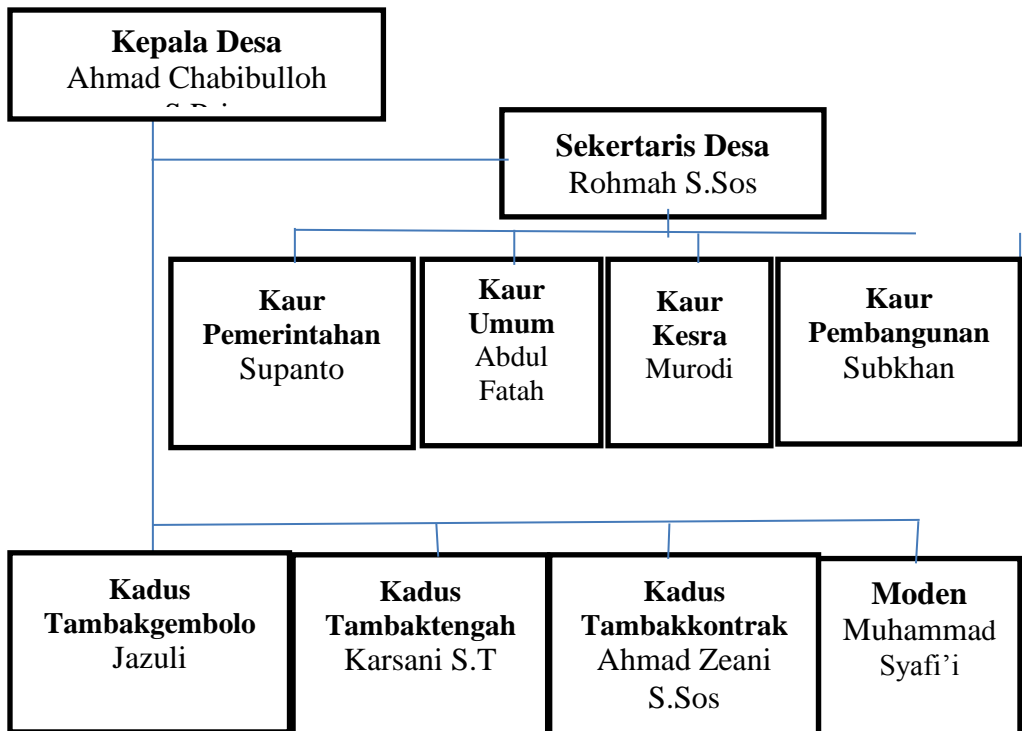
¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Subkhan selaku Kaur Pembangunan, pada 8 Mei 2018.

dan bandeng dengan benar, serta memberikan fasilitas alat-alat tambak yang dibeli dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk dipinjamkan kepada kelompok petani tambak tersebut.¹¹

F. Struktur Perangkat Desa

Struktur Perangkat Desa Tambakbulusan Kecamatan

Karangtengah Kabupaten Demak



Sumber: Kelurahan Desa Tambakbulusan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Subkhan selaku Kaur Pembangunan, pada 8 Mei 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab.

Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Zaeni mengatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zaeni pemberdayaan yang berlangsung di Desa Tambakbulusan. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Menurut Anwas (2014) Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan

kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).

Pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut- sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.

Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah

penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Tambakbulusan untuk berbenah diri.

Sesuai dengan penjelasan diatas, kini program pembangunan di Desa Tambakbulusan mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Desa Tambakbulusan sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Tambakbulusan itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Tambakbulusan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Tambakbulusan terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan di Desa Tambakbulusan hanya baru sebatas pada ranah pembangunan

fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Menurut Chabib (2015) Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya

dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Beberapa strategi pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan dalam meningkatkan kualitas desa sebagai berikut:

1. Perbaiki akses jalan, jembatan dan lain-lain

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala Nasional. Tidak hanya itu, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur, akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya, serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor.

Kondisi pembangunan di Desa Tambakbulusan saat ini memang belumlah berjalan secara pesat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belumlah sepenuhnya memadai, salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur

jalan desa. Sesuai dengan salah satu misi dari Desa Tambakbulusan yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana desa, maka dalam proses optimalisasi ini diawali dengan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Desa Tambakbulusan melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Program Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa ADD. Pemerintah Desa Tambakbulusan dalam pemanfaatan dana desanya, secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan dalam rangkan untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan desa, dan perbaikan jalan ke tempat pemakaman umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2017, Pemerintah Desa Tambakbulusan telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan di dusun-dusun. Dari hasil wawancara dengan Bapak Subkhan, dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Tambakbulusan di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Desa Tambakbulusan.”

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tambakbulusan, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambakbulusan benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Tambakbulusan menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan

masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Tambakbulusan sendiri berharap masyarakat Tambakbulusan terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Desa Tambakbulusan mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu membuat batik, kuliner seperti bandeng cabut duri dll. Dalam pemberdayaan PKK ini

pemerintah desa Tambakbulusan mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

4. Menciptakan Program Kelompok Petani Tambak.

Pemerintah Tambakbulusan juga menciptakan beberapa kelompok petani tambak yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari panen tersebut, salah satu programnya adalah memberi pelatihan yaitu cara membuat makanan udang windu dan bandeng, serta memberikan fasilitas alat-alat tambak yang dibeli dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk dipinjamkan kepada kelompok petani tambak tersebut.

Didesa Tambakbulusan terdapat 8 kelompok petani tambak yang dibentuk oleh desa melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Kelompok Petani Tambak Sumber Bago
- 2) Kelompok Petani Tambak Pangudi Rizki
- 3) Kelompok Petani Tambak UTAMA (Usaha Tambak Maju)
- 4) Kelompok Petani Tambak Rumput Kencana
- 5) Kelompok Petani Tambak Rizquna
- 6) Kelompok Petani Tambak Barokah
- 7) Kelompok Petani Tambak Sulaimaniyah
- 8) Kelompok Petani Tambak Usaha Mina Jaya.

Terdapat juga 1 kelompok petani tambak yang dibentuk dari LSM Belanda Weight land serta dibantu oleh

LSM lokal Delta Rest sebagai fasilitator dan Blue Forest yaitu Kelompok Petani Tambak Djaya Bhakti. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan metode sekolah lapang. Adapun pelatihan-pelatihan yang diadakan sekolah lapang yaitu: belajar membuat mol, membuat kompos, aplikasi nila salin, membuat pakan dengan bahan organik.

5. Menjadikan Desa Tambakbulusan sebagai desa wisata

Tambakbulusan adalah desa yang berpotensi wisata bahari terbaik di Demak. Keindahan panorama pantai yang dikelilingi hutan mangrove dengan eksotis memiliki garis pantai sepanjang tiga kilometer, hamparan pasir hitam dari laut tidak menempel di kaki ketika diinjak, disepanjang garis pantainya sejauh mata memandang burung kuntul menyebar disana-sini.

Oleh karena itu, pemerintah Desa Tambakbulusan ingin mengembangkan potensi desa untuk dijadikan desa wisata. Yang bertujuan untuk salah satu pemberdayaan mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tambakbulusan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Fatah selaku Kaur Umum mengatakan:

“Sejauh ini, pihak desa masih mempersiapkan konsep desa wisata dengan menggandeng Kelompok Sumber Bago, kelompok pegiat lingkungan. Meski masih membutuhkan peningkatan infrastruktur, namun

pihaknya telah berkomitmen mengalokasikan sejumlah anggaran guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara ini untuk wisata mangrove dan pantai belum dipungut biaya seperti tiket masuk dll, serta tersedia gazebo yang dibangun dari dana desa (DD) di track mangrove. Ke depan, konsep pengelolaan wisata pantai beserta hutan mangrove akan diarahkan dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) dan setiap satu tahun sekali diadakan wisata Syawalan. Selain menambah pendapatan bagi desa, tentu dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.”

Dari hasil wawancara diatas ada beberapa wisata yang ada di desa Tambakbulusan yaitu:

- 1) Wisata mangrove dan pantai glagahwangi
- 2) Wisata Syawalan merupakan tradisi di kalangan masyarakat Jawa setelah berlebaran (hari raya Idul Fitri). Disebut syawalan karena pelaksanaannya pada bulan Syawal, dan ini hanya ada setelah lebaran (Idul Fitri). Wisata syawalan biasanya dilakukan di laut Jawa, pemerintah desa Tambakbulusan memanfaatkan pantai Glagah wangi untuk wisata Syawalan agar dapat membantu perekonomian masyarakat serta

mengenalkan wisata mangrove dan pantai di desa Tambakbulusan.

6. Mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Dalam wawancara dengan bapak Abdul Fatah, untuk pembangunan desa terdapat rencana jenis usaha yang akan dikembangkan melalui BUMDes diantaranya:

- a. program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga

masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan peri-urban. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

B. Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam

motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Tambakbulusan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah desa Tambakbulusan sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Subkhan dikatakan bahwa:

“Dengan adanya program pembangunan desa menggunakan dana desa dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana kesehatan (puskesmas dan posyandu), peningkatan sarana keamanan (menghidupkan kembali siskamling), peningkatan sarana ibadah, mengadakan pelatihan-pelatihan (seperti membuat batik, menciptakan inovasi kuliner baru, dll) serta memberikan penyuluhan dan mengoptimalkan kelompok petani tambak, nelayan dan peternakan.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa Tambakbulusan berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta

kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian. Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَأُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah

membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pembangunan desa seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam, antarlain:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam pembangunan dan perekonomian. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (*falah*) diakhirat.

Berdasarkan teori diatas prinsip tauhid yang ditanamkan kepada masyarakat desa Tambakbulusan yaitu ketika pembangunan sarana tempat ibadah dengan

cara gotong royong untuk membangun madrasah diniyah dan masjid, masyarakat hadir ikut serta dalam kegiatan pembangunan dari awal proses perencanaan sampai akhir pelaksanaan.

2. Prinsip Nubuwah

Menurut Adiwarman prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adiwarman, dalam praktiknya pemerintah desa Tambakbulusan berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pembangunan desa.

3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- a. Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.

- b. Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup didunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

Berdasarkan prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam, di dalam praktiknya pemerintah desa Tambakbulsan memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

4. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Dalam wawancara dengan bapak Muhyiddin sebagai seorang tokoh agama berpendapat bahwa pemerintah desa Tambakbulsan pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah

dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasar pada teori diatas menunjukkan bahwa konsep keseimbangan pada pengelolaan di desa Tambakbulusan telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa Tambakbulusan.

5. Prinsip Keadilan

Dari wawancara dengan bapak Muslih selaku masyarakat desa Tambakbulusan mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap rt atau dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Berdasarkan teori dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa. Tetapi pemberdayaan yang dilakukan masih kurang merata, masih terdapat warga yang pekerjaannya serabutan belum mendapatkan pelatihan-pelatihan agar bisa mandiri.

6. Prinsip Masalah dan Manfaat

Prinsip masalah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (mafsadah) bagi manusia.

Berdasarkan teori dan wawancara dengan bapak Abdul Fatah selaku Kaur Pembangunan desa Tambakbulusa, dengan adanya pemberdayaan, pengadaan pelatihan-pelatihan dan pembukaan desa wisata yang ada di desa Tambakbulusan diharap dapat menjaga kelestarian hutan mangrove dan pantai serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

7. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringankan bebannya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah sebagaimana yang

diajarkan ekonomi kapitalisme. Sebuah perjuangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman yang fakir ataupun miskin.

Persaudaraan dan saling tolong-menolong berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong-menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya. Melalui kebersamaan kompleksitas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa ringan dan mudah untuk dilaksanakan.

Adapun contoh persaudaraan dan saling tolong-menolong dalam pemberdayaan di desa Tambakbulusan yaitu dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok tani tidak melihat simiskin dan sikaya, semua dilatih sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing meskipun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang merata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa akibat program pembangunan desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan desa. Konsep pembangunan desa memahami cara pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan-pelatihan kreativitas seperti pelatihan membuat batik, budidaya ikan bandeng dan udang windu, kuliner bandeng cabut duri dan lain-lain. Rangkaian kegiatan pembangunan perdesaan terdiri dari sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di desa Tambakbulusan kecamatan Karangtengah Demak telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi. Adanya peranan kebijakan pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Perspektif Ekonomi Islam tentang Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan.

Pembangunan di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karantengah Demak memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti petani tambak, pedagang, wiraswasta, dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dan jembatan dalam melintasinya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidangnya merasa diuntungkan karena mendapat pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian mereka.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang dapat diberikan penulis untuk kemajuan Indonesia terutama Desa Tambakbulusan Kecamatan Karantengah Demak yakni: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai masalah-masalah perkembangan perekonomian dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dengan dilakukannya penelitian ini

diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan pembangunan perekonomian di pedesaan.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam pembahasan, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Anwas Oos, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Azizah Rosfa Nur, *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2017.
- Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Fatoni Nur, “*Peran Misyakat (Micro Finance Syari’ah untuk Masyarakat) DPU (Dompot Peduli Umat) Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan*”, *Jurnal Economica UIN Walisongo* Vol. V Edisi 1 Mei 2014.
- Harahap Angga, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)*, Medan: Tesis Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Hasan, Tholhah Muhammad, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

<https://sochehsatriabangsa.wordpress.com/2017/04/17/sejarah-desa-tambak-bulusan-karangtengah-demak-59561/amp/>, diakses 06 April 2018

Irawan Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1998.

Jayadinata dkk, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Khoirin Nur, et al. *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang*, Semarang: Laporan Karya Pengabdian Dosen UIN Walisongo Semarang, 2014. Lakitan Benyamin dkk, *Metodologi Penelitian*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998.

Khuzaimah Sa'adatina, "*Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Maulana M. Indra, *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi*

- pada Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan), Lampung: UIN Raden Intan, 2018
- Muthoriq dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nur Sahida Mohammad et al, *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal*, Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013.
- Putra Candra Kusuma, et al, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Rodin Dede, “*Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur’an*”, Jurnal Economica UIN Walisongo Vol. VI Edisi 1 Mei 2015.
- Sarwono Jhonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholeh Chabib, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2015.

- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfa Beta, 1998.
- Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yafie Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yunia Fauzia Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja strategi pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tambakbulusan?

Jawaban:

“Dengan adanya program pembangunan desa menggunakan dana desa dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai kita tingkatkan. Contohnya adalah peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana kesehatan (puskesmas dan posyandu), peningkatan sarana keamanan (menghidupkan kembali siskamling), peningkatan sarana ibadah, mengadakan pelatihan-pelatihan (seperti membuat batik, menciptakan inovasi kuliner baru, dll), serta memberikan penyuluhan dan mengoptimalkan kelompok petani tambak, nelayan dan peternakan.”

2. Apasaja proses pembangunan desa yang sudah berjalan?

Jawaban:

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah desa Tambakbulusan di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian desa, pembangunan pos pelayanan terpadu, pembinaan dan pengelolaan posyandu, menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), menciptakan program kelompok petani tambak.”

3. Bagaimana antusias masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan?

Jawaban:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau

pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”

4. Ada berapa jumlah kelompok tani yang dibentuk oleh desa dalam hal pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

“Didesa Tambakbulusan terdapat 8 kelompok petani tambak yang dibentuk oleh desa melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu: Kelompok Petani Tambak Sumber Bago, Kelompok Petani Tambak Pangudi Rizki, Kelompok Petani Tambak UTAMA (Usaha Tambak Maju), Kelompok Petani Tambak Rumput Kencana, Kelompok Petani Tambak Rizquna, Kelompok Petani Tambak Barokah, Kelompok Petani Tambak Sulaimaniyah, Kelompok Petani Tambak Usaha Mina Jaya, terdapat juga 1 kelompok petani tambak yang dibentuk dari LSM Belanda Weight land serta dibantu oleh LSM lokal Delta Rest sebagai fasilitator dan Blue Forest yaitu Kelompok Petani Tambak Djaya Bhakti. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan metode sekolah lapang. Adapun pelatihan-pelatihan yang diadakan sekolah lapang yaitu: belajar membuat mol, membuat kompos, aplikasi nila salin, membuat pakan dengan bahan organik.”

5. Bagaimana konsep desa wisata yang bertujuan untuk salah satu pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah demak?

Jawaban:

“Sejauh ini, pihak desa masih mempersiapkan konsep desa wisata dengan menggandeng Kelompok Sumber Bago, kelompok pegiat lingkungan. Meski masih membutuhkan peningkatan infrastruktur, namun pihaknya telah berkomitmen mengalokasikan sejumlah anggaran guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara ini untuk wisata mangrove dan pantai belum dipungut biaya seperti tiket masuk dll, serta tersedia gazebo yang dibangun dari dana desa (DD) di track mangrove. Ke depan, konsep pengelolaan wisata pantai beserta hutan mangrove akan diarahkan dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) dan setiap satu tahun sekali diadakan wisata Syawalan. Selain menambah pendapatan bagi desa, tentu dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.”

6. Apakah dalam pengelolaan dana desa menggunakan sistem musyawarah?

Jawaban:

“Pada pengelolaan dana desa pemerintah selalu bermusyawarah dengan masyarakat dan lembaga yang ada dalam meentukan arah pembangunan dan pemberdayaan.”

7. Berapa jumlah penduduk miskin desa Tambakbulusan?

Jawaban:

“Data jumlah penduduk miskin desa Tambakbulusan pada tahun 2016-2018 di karenakan jumlah penerima RASKIN (Beras Bersubsidi) menurun, pada tahun 2016-2017 sejumlah 782 KK sedangkan pada tahun 2017-2018 sejumlah 364 KK.”

8. Apakah dalam pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar pada kesepakatan bersama?

Jawaban:

“Pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap rt atau dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.”

B. Daftar Dokumentasi



Pembentukan wirausaha baru



Pembentukan wirausaha baru



Gotongroyong pembangunan masjid



Gotong-royong pembangunan jalan



Pelatihan aklimatasi bibit ikan yang di adakan oleh Blue forest



Pelatihan pengamatan agroekosistem tambak oleh Blue Forest



Wawancara dengan bapak Abdul Fatah selaku Kaur Umum



Wawancara dengan bapak Ahmad Zeani selaku Kadus 3



Wawancara dengan bapak Subkhan selaku
Kaur Pembangunan



Musyawarah Desa



Kantor Desa Tambakbulusan



Kantor Desa Tambak Bulusan



Puskesmas Desa Tambakbulusan



Posyandu Desa Tambakbulusan



Wawancara dengan ibu Wening Tiyas
Kismorodati selaku Staf Lapangan Delta rest

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ummi Nurul Hidayah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 29 Desember 1995
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Ds. Tambak Bulusan Rt.02 Rw.04
Kec. Karang Tengah. Kab. Demak.
Nomor Telepon : 085600220399
E-mail : umminurul_h@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- 2001 – 2007 SDN Tambak Bulusan 01 Karang Tengah Demak
- 2007 – 2010 SMP Al-Islam Karang Tengah Demak
- 2010 – 2013 SMA N 3 Demak
- 2013 – 2016 D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

Semarang, 27 Juli 2018

Ummi Nurul Hidayah